**PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA
DAN
PERAN HUKUM TATA NEGARA BAGI MAHASISWA ILMU HUKUM**

Disusun Oleh :
OKTA WISNU MANGGALA
BP : 1910003600215
Email : oktawisnu123@gmail.com
Kelas : 2H2

Fakultas Hukum
UNIVERSITAS EKA SAKTI PADANG

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul "Pengertian Hukum Tata Negara dan Peran Hukum Tata Negara Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum" ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dosen pada Fakultas Hukum [hukum Tata negara]. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang [Perkembangan Hukum tata negara] bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu, selaku dosen Fakultas Hukum [Hukum Tata negara] yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini.

Saya menyadari, makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Padang, 25 maret 2020

Okta Wisnu Manggala

Daftar Isi

Peran Hukum tata negara

Kata pengantar.

Bab I

Pendahuluan.

Latar belakang.

Identifikasi masalah.

Kegunaan makalah.

Metode penelitian.

Bab II

Pembahasan.

Pengertian hukum Tata Negara.

Tujuan Hukum Tata Negara.

Fungsi Hukum Tata negara.

Tujuan dan peran hukum tata negara bagi mahasiswa ilmu hukum.

Asas Hukum Tata Negara.

Faktor - faktor utama hukum Tata negara.

Bab III

Penutup.

Kesimpulan.

Saran.

BAB I

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan peranan dari aparaturnya dalam pelaksanaan pembangunan. Tugas pembangunan adalah salah satu dari aspek penyelenggaraan tugas pemerintahan yang sarannya terwujud dalam tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi logis dari adanya tugas yang diemban dari aparaturnya ini dilakukan suatu perbuatan penetapan (beschikking handling) yang menghasilkan ketetapan (beschikking).

Pengertian ketetapan, yaitu: suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa unsur yang terdapat yang terdapat dalam beshikking menurut beberapa para sarjana, yaitu: penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan pengertian ketetapan di atas, Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) / ketetapan tata usaha Negara (KTUN) harus memperhatikan unsur-unsur dan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (rechtgeldig) dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut ialah syarat materil dan syarat formil. Ketetapan yang telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, maka ketetapan itu telah sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum.

Identifikasi Masalah

Dalam makalah ini saya mencoba mengidentifikasi masalah mengenai Ketetapan Tata Usaha Negara/(Beschikking).

Adapun yang saya bahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Istilah Ketetapan;
2. Definisi Ketetapan;
3. Unsur-unsur Ketetapan;
4. Macam-macam Ketetapan;
5. Syarat-syarat Ketetapan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :

1. Tujuan Subjektif:

Adapun tujuan subjektif penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan-bahan guna menyusun makalah mengenai analisis Ketetapan Tata Usaha Negara/(Beschikking), sebagaimana syarat yang harus di tempuh dalam Tugas UTS Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara.

2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk mengetahui pengertian ketetapan dan unsur-unsur serta syarat-syarat dari ketetapan.
- b. Untuk dapat mengerti dan membedakan suatu ketetapan berdasarkan persyaratan - persyaratan untuk menjadi suatu ketetapan.

Kegunaan Makalah

1. Kegunaan teoritis

Dapat menambah referensi bagi penulisan berikutnya tentang Ketetapan Tata Usaha Negara/(Beschikking).

2. Kegunaan Praktis

Memberikan gambaran sejauh mana perubahan dan perkembangan yang telah terjadi dalam ketata negaraan kita dan dapat memberi sumbangan pikiran bagi Ilmu Pengetahuan Hukum Administrasi Negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah :

Penelitian bersifat deskriptif analisis,yaitu untuk menggambarkan Ketetapan Tata Negara/(Beschikking)

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur tentang norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal berhubungan kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, serta hubungan alat perlengkapan negara tersebut.

2. Tujuan Hukum Tata Negara

- Menyebarluaskan pengertian-pengertian baru yang terkandung pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen.
- Mendorong supaya muncul kesadaran warga negara Indonesia akan hak dan kewajiban asasinya sebagai subjek Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Membantu para pemula memahami garis besar ruang lingkup ilmu pengetahuan tentang Hukum Tata Negara.
- Mengakrabkan masyarakat Indonesia dengan pengetahuan tentang Hukum Tata Negara.
- Mendorong perkembangan lebih lanjut Studi tentang Hukum Tata Negara di Indonesia.

3.Fungsi Hukum Tata Negara

1. Hukum Tata Negara sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat
2. Hukum Tata Negara sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin
3. Hukum Tata Negara sebagai sarana penggerak pembangunan
4. Fungsi kritis dari hukum tata Negara adalah daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur penegak hukum termasuk yang ada di dalamnya

- **Tujuan dari belajar hukum tata negara pada fakultas hukum adalah**

1. Ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara atau hukum positif atau *Ius Constitutum*.
2. Ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum, dan perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum.
3. Ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat atau hak dan kewajibannya.
4. Ingin mengetahui sanksi-sanksi apa yang diderita oleh seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Samidjo, mengatakan bahwa tujuan mempelajari tata hukum Indonesia adalah mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

4.Asas Hukum Tata Negara

- **Asas Pancasila**

Asas pancasila adalah sumber hukum materil karena itu setiap pengaturan isi peraturan perundangan tidak boleh bertentangan pada Pancasila dan bila terjadi maka peraturan tersebut harus segera dicabut.

- Pancasila sebagai asas Hukum Tata Negara bisa dilihat dari:
- Asas Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Ke-1).
- Asas Prikemanusiaan (Sila Ke-2).
- Asas Kebangsaan (Sila Ke-3).
- Asas Kedaulatan Rakyat (Sila Ke-4)
- Asas keadilan (Sila Ke-5)
- Asas Kedaulatan Rakyat

Dalam Hukum Tata Negara pengertian kedaulatan bisa relatif, maksudnya bahwa kedaulatan itu tidak hanya dikenal pada negara-negara yang memiliki kekuasaan penuh keluar dan kedalam tapi juga dapat dikenakan kepada negara-negara yang berhubungan pada sebuah perjanjian yang berbentuk traktat atau dalam bentuk konfederasi atau federasi. kedaulatan tersebut tidak terpecah-pecah karena dalam suatu negara hanya ada satu kekuasaan yang tertinggi.

Kedaulatan rakyat adalah bahwa rakyatlah yang memiliki wewenang yang tertinggi yang menentukan segala wewenang dalam negara kedaulatan rakyat diwakilkan pada MPR, kekuasaan majelis itu nyata dan ditentukan oleh UUD tapi oleh karena majelis merupakan sebuah badan yang besar dan lamban sifatnya maka ia menyerahkan lagi kepada badan-badan yang ada dibawahnya.

- Asas Negara Hukum

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga Negaranya. Keadilan adalah syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan perlu di ajarkan rasa susila pada setiap manusia supaya dia menjadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada bila peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

- **Asas Pembagian Kekuasaan**

Pengertian pembagian kekuasaan beda dari pengertian pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan artinya bahwa kekuasaan Negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya ataupun fungsinya. Kenyataan menunjukkan bahwa sebuah pemisahan kekuasaan murni tidak bisa dilaksanakan. Karena itu pilihan jatuh kepada istilah pembagian kekuasaan yang artinya bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, namun tidak dipisahkan. Hal membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian tersebut dimungkinkan adanya kerjasama.

- **Asas Negara Kesatuan**

Salah satu cara untuk menjaga keutuhan negara ini yakni dengan membentuk hukum tata negara yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Terkandung dalam UUD 1945, pasal 1 ayat (1) sudah ditegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Setiap hukum tata negara yang hendak dibentuk harus memperhatikan pada hal ini.

Tidak dibenarkan adanya materi di dalam hukum tata negara yang mempunyai peluang untuk memecah belah bangsa ini. Oleh sebab itu, salah satu tahapan kebijakan publik adalah menguji kebijakan publik, semata untuk mencegah supaya kebijakan publik tersebut berpotensi menjadi penyebab konflik sosial.

Faktor-Faktor Utama dalam Ketatanegaraan

Ada tiga faktor utama dalam hal ketatanegaraan menurut Solly Lubis (1982: 15), yaitu: (a). Faktor filsafat negara, (b). Faktor konstitusi dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan (c). Faktor garis politik, yang satu sama lain sangat erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan baik dalam teori maupun praktek.

- Faktor filsafat, ialah dasar filsafat negara yang disebut juga dasar atau landasan idiil. Dasar filsafat ini berakar pada pandangan hidup masyarakat yang mendukung negara itu, misalnya: Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang berakar pada pandangan hidup termasuk cita-cita ketatanegaraan, yang terbentuk dari watak dan kepribadian bangsa Indonesia.
- Faktor konstitusi atau UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ialah ketentuan hukum mengenai struktur negara dan pemerintahannya, termasuk bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya, tugas alat-alat perlengkapan itu serta hubungannya satu sama lain

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas saya menyimpulkan bahwa:

1. Pengertian penetapan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu: suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ada beberapa unsur yang terdapat yang terdapat dalam Bescikking, yaitu:

Penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersifat konkrit, individual dan final.

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

3. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan penetapan mencakup syarat-syarat material dan syarat formal.

Saran

1. Klausula pengaman yang pada umumnya berbunyi: “apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali”. Rumusan klausula seperti ini disatu sisi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan disisi lain, bertentangan dengan prinsip praduga rechmatig. Dengan kata lain klausula pengaman itu merupakan suatu hal yang keliru sebab dapat menggoyahkan sendi-sendi kepastian hukum. Oleh karena itu, rumusan semacam ini sebaiknya tidak ada, karena kalau memang ada kekurangan sebaiknya keputusan itu ditarik kembali atau diperbaiki dengan cara-cara yang ditetapkan.
2. Ketetapan dapat menyangkut tindakan yang berlaku satu kali dan akan berakhir atau dapat menyangkut suatu keadaan yang berjalan lama. Dalam keadaan tertentu ketetapan berjalan lama dapat dilakukan perubahan-pengubahan. Perubahan itu sewajarnya dilakukan dengan kecermatan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirdjo, Prajudi , Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,1994.

Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah , LPPM Unisba,Bandung,1985